



PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA TENGAH

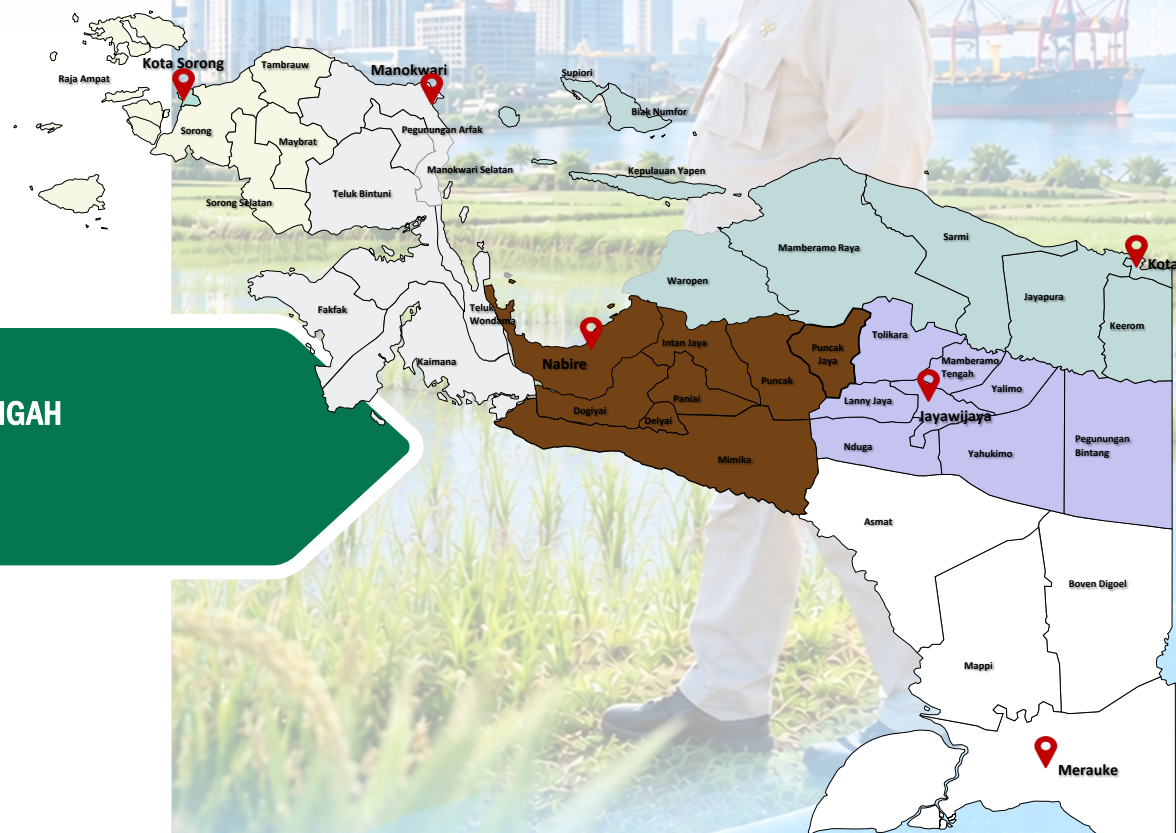


OVERVIEW IMPLEMENTASI INPRES 107/2025 RAPPP DI PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH, PROVINSI PAPUA TENGAH

ELIEZER YOGI, S.STP., M.SI.

21 September 2026





DINAMIKA PELAKSANAAN RAPPP PROVINSI PAPUA TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA TENGAH



DALAM LAMPIRAN INPRES 107/2025

TERDAPAT

78 KEGIATAN (PROYEK PRIORITAS)

YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH
SEBAGAI PELAKSANA

MENDUKUNG



PAPUA
SEHAT



PAPUA
CERDAS



PAPUA
PRODUKTIF





PEMERINTAH PROVINSI
PAPUA TENGAH

EVALUASI PELAKSANAAN RAPPP PROVINSI PAPUA TENGAH MELALUI DANA OTSUS



MEKI F. NAWIPA
GUBERNUR PAPUA TENGAH



MATRIK RAPPP PROVINSI PAPUA TENGAH 2026–2029

Pelaksana Pemerintah Daerah

NO.	MISI	PROGRAM PERCEPATAN	SUB PROGRAM PERCEPATAN	KEGIATAN (PROYEK PRIORITAS / KEGIATAN / MENU)	IMPLEMENTASI PELAKSANAAN (SUMBER DANA OTSUS TA.2026)
1	Papua Sehat	Pelayanan Kesehatan Bergerak	Pelayanan Kesehatan Bergerak	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya = Rp. 27 M
2	Papua Sehat	Pelayanan Kesehatan Bergerak	Pelayanan Kesehatan Bergerak	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak = Rp. 1,3 M
3	Papua Sehat	Pelayanan Kesehatan Bergerak	Pelayanan Kesehatan Bergerak	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan = Rp. 5,6 M
4	Papua Sehat	Pelayanan Kesehatan Bergerak	Pelayanan Kesehatan Bergerak	Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan Bagi Tenaga Kesehatan Papua Termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Khususnya di Daerah Terpencil	• Penyediaan Alat Kesehatan RSUD 8 Kabupaten = Rp. 30 M • Pembangunan RSUD Provinsi (Dokumen Perencanaan, Penyiapan Lahan) = Rp. 27,8 M • Pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat = Rp. 12,7 M • Pemberian Jaminan Kesehatan Keluarga = Rp. 16,8 M
5	Papua Sehat	Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	
6	Papua Sehat	Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	
7	Papua Sehat	Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta OAP	
8	Papua Sehat	Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Penyelenggaraan Jaminan Keamanan Bagi Tenaga Kesehatan, Khususnya di Daerah Terpencil dan/atau Rawan Konflik	

Sumber:

- Lampiran Inpres 107/2025 pada RAPPP Tahun 2025–2029
- Rencana Anggaran dan Program Otsus TA 2026

MATRIK RAPPP PROVINSI PAPUA TENGAH 2026–2029

Pelaksana Pemerintah Daerah

NO.	MISI	PROGRAM PERCEPATAN	SUB PROGRAM PERCEPATAN	KEGIATAN (PROYEK PRIORITAS / KEGIATAN / MENU)	IMPLEMENTASI PELAKSANAAN (SUMBER DANA OTSUS TA.2026)
9	Papua Sehat	Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat	• Penyediaan Obat dan Alat = Rp. 12,1 M • Penyediaan Alat Kesehatan 8 Puskesmas Percontohan = Rp. 5,9 M
10	Papua Sehat	Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percepatan Penurunan Stunting	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
11	Papua Sehat	Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percepatan Penurunan Stunting	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
12	Papua Sehat	Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percepatan Penurunan Stunting	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
13	Papua Sehat	Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua	
14	Papua Cerdas	Pengembangan Sekolah Terbuka	Pengembangan Sekolah Terbuka	Penyediaan Biaya Pendidikan Bagi OAP	• Bantuan beasiswa Pendidikan Tinggi = Rp. 30,7 M • Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa SMP = Rp. 25,7 M • Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa SMA = Rp. 17,3 M • Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa SMK = Rp. 11,6 M
15	Papua Cerdas	Pengembangan Sekolah Terbuka	Pengembangan Sekolah Terbuka	Penjaminan Keamanan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kewenangannya	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi Tenaga Pendidik = Rp. 2,5 M
16	Papua Cerdas	Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas (Rp. 2 M)

Sumber:

- Lampiran Inpres 107/2025 pada RAPPP Tahun 2025–2029
- Rencana Anggaran dan Program Otsus TA 2026

MATRIK RAPPP PROVINSI PAPUA TENGAH 2026–2029

Pelaksana Pemerintah Daerah

NO.	MISI	PROGRAM PERCEPATAN	SUB PROGRAM PERCEPATAN	KEGIATAN (PROYEK PRIORITAS / KEGIATAN / MENU)	IMPLEMENTASI PELAKSANAAN (SUMBER DANA OTSUS TA.2026)
17	Papua Cerdas	Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan	- Program Sekolah Sepanjang Hari = Rp. 75 M - Program MAPEGA = Rp. 30 M
18	Papua Produktif	Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembang an Sentra Produksi Perikanan TCT	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Waharia Nabire = Rp. 10 M
19	Papua Produktif	Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembang an Sentra Produksi Perikanan TCT	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	
20	Papua Produktif	Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembang an Sentra Produksi Perikanan TCT	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
21	Papua Produktif	Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembang an Sentra Produksi Perikanan TCT	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	
22	Papua Produktif	Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembang an Sentra Produksi Perikanan TCT	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	
23	Papua Produktif	Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembang an Sentra Produksi Perikanan TCT	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pembinaan petani dan penanaman sejuta pohon kopi = Rp. 5 M
24	Papua Produktif	Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembang an Sentra Produksi Perkebunan Kopi	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	

Sumber:

- Lampiran Inpres 107/2025 pada RAPPP Tahun 2025–2029
- Rencana Anggaran dan Program Otsus TA 2026

MATRIK RAPP PROVINSI PAPUA TENGAH 2026–2029

Pelaksana Pemerintah Daerah

NO.	MISI	PROGRAM PERCEPATAN	SUB PROGRAM PERCEPATAN	KEGIATAN (PROYEK PRIORITAS / KEGIATAN / MENU)	IMPLEMENTASI PELAKSANAAN (SUMBER DANA OTSUS TA.2026)
25	Papua Produktif	Pengembangan n Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Kopi	Penataan Prasarana Pertanian	Pembinaan petani dan penanaman sejuta pohon kopi = Rp. 5 M
26	Papua Produktif	Pengembangan n Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Kopi	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	
27	Papua Produktif	Pengembangan n Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Kopi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
28	Papua Produktif	Pengembangan n Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Kopi	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
29	Papua Produktif	Pengembangan n Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Kopi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
30	Papua Produktif	Pengembangan n Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Kopi	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	
31	Papua Produktif	Pengembangan n Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembangan Sentra Produksi Perkebunan Kopi	Kemitraan Usaha Nasional	
32	Papua Produktif	Pengembangan n Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan	Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	

Sumber:

- Lampiran Inpres 107/2025 pada RAPP Tahun 2025–2029
- Rencana Anggaran dan Program Otsus TA 2026

MATRIK RAPPP PROVINSI PAPUA TENGAH 2026–2029

Pelaksana Pemerintah Daerah

NO.	MISI	PROGRAM PERCEPATAN	SUB PROGRAM PERCEPATAN	KEGIATAN (PROYEK PRIORITAS / KEGIATAN / MENU)	IMPLEMENTASI PELAKSANAAN (SUMBER DANA OTSUS TA.2026)
33	Papua Produktif	Pengembangan Pariwisata Rintisan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Pengembangan Potensi Pariwisata = Rp. 5 M
34	Papua Produktif	Pengembangan Pariwisata Rintisan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
35	Papua Produktif	Pengembangan Pariwisata Rintisan dan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kawasan Pariwisata Bahari	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
36	Papua Produktif	Swasembada Pangan	Pengembangan Pangan Lokal Sagu	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan = Rp. 5 M
37	Papua Produktif	Swasembada Pangan	Pengembangan Pangan Lokal Babi	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pengembangan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan = Rp. 5 M
38	Papua Produktif	Peningkatan Investasi Kawasan	Pengembangan Kawasan Pertambangan Emas-Tembaga-Perak	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha = Rp. 5 M
39	Papua Produktif	Peningkatan Investasi Kawasan	Pengembangan Kawasan Pertambangan Emas-Tembaga-Perak	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	
40	Papua Produktif	Peningkatan Investasi Kawasan	Pengembangan Kawasan Pertambangan Emas-Tembaga-Perak	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	

Sumber:

- Lampiran Inpres 107/2025 pada RAPPP Tahun 2025–2029
- Rencana Anggaran dan Program Otsus TA 2026

MATRIK RAPPP PROVINSI PAPUA TENGAH 2026–2029

Pelaksana Pemerintah Daerah

NO.	MISI	PROGRAM PERCEPATAN	SUB PROGRAM PERCEPATAN	KEGIATAN (PROYEK PRIORITAS / KEGIATAN / MENU)	IMPLEMENTASI PELAKSANAAN (SUMBER DANA OTSUS TA.2026)
41	Papua Produktif	Peningkatan Investasi Kawasan	Pengembangan Kawasan Pertambangan Emas-Tembaga-Perak	Memfasilitasi Kemitraan Usaha Melalui Rantai Pasok antara Usaha Besar, Usaha Menengah, dengan Usaha Kecil dan Usaha Mikro untuk Mempercepat Transformasi UMKM dalam Meningkatkan Skala Usaha	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan = Rp. 2 M
42	Papua Produktif	Peningkatan Investasi Kawasan	Pengembangan Kawasan Pertambangan Emas- Tembaga-Perak	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
43	Papua Produktif	Peningkatan Investasi Kawasan	Pengembangan Kawasan Pertambangan Emas- Tembaga-Perak	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
44	Papua Produktif	Pembangunan Ibu Kota Daerah Otonom Baru dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Berkelanjutan	Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Daerah Otonom Baru (DOB)	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Pemerintahan Lainnya = Rp. 399 M
45	Papua Produktif	Pembangunan Ibu Kota Daerah Otonom Baru dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Berkelanjutan	Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Daerah Otonom Baru (DOB)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	- Rekonstruksi Jalan dan Rehabilitasi Jalan = Rp. 56 M - Pembangunan Jalan Lingkar Danau Tigi = Rp. 31,6 M
46	Prasyarat Pembangunan: Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Peningkatan Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Jalan dan Jembatan yang Terintegrasi	Penanganan Jalan Provinsi	
47	Prasyarat Pembangunan: Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Swasembada Air dan Energi	Peningkatan Ketahanan Energi	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung	Pembangunan PLTS = Rp. 39,9 M
48	Prasyarat Pembangunan: Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Swasembada Air dan Energi	Peningkatan Ketahanan Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan 2 Unit Instalasi Pengolahan Air Bersih = Rp. 4,5 M

Sumber:

- Lampiran Inpres 107/2025 pada RAPPP Tahun 2025–2029
- Rencana Anggaran dan Program Otsus TA 2026

MATRIK RAPP PROVINSI PAPUA TENGAH 2026–2029

Pelaksana Pemerintah Daerah

NO.	MISI	PROGRAM PERCEPATAN	SUB PROGRAM PERCEPATAN	KEGIATAN (PROYEK PRIORITAS / KEGIATAN / MENU)	IMPLEMENTASI PELAKSANAAN (SUMBER DANA OTSUS TA.2026)
49	Prasyarat Pembangunan: Lingkungan Hidup	Peningkatan Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Upaya Mitigasi dan Pencegahan Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Perubahan Iklim	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
50	Prasyarat Pembangunan: Lingkungan Hidup	Peningkatan Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Upaya Mitigasi dan Pencegahan Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Perubahan Iklim	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
51	Prasyarat Pembangunan: Lingkungan Hidup	Peningkatan Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Upaya Mitigasi dan Pencegahan Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Perubahan Iklim	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
52	Prasyarat Pembangunan: Lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Jasa Lingkungan Secara Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
53	Prasyarat Pembangunan: Lingkungan Hidup	Pembangunan Rendah Karbon dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Jasa Lingkungan Secara Berkelanjutan	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
54	Prasyarat Pembangunan: Tata Kelola Pembangunan	Peningkatan Kapasitas ASN dan Pelayanan Publik	Penguatan Kelembagaan Siber Pemerintahan	Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri = Rp. 12,5 M
55	Prasyarat Pembangunan: Tata Kelola Pembangunan	Peningkatan Kapasitas ASN dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kompetensi ASN	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
56	Prasyarat Pembangunan: Tata Kelola Pembangunan	Peningkatan Kapasitas ASN dan Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	

Sumber:

- Lampiran Inpres 107/2025 pada RAPP Tahun 2025–2029
- Rencana Anggaran dan Program Otsus TA 2026

MATRIK RAPPP PROVINSI PAPUA TENGAH 2026–2029

Pelaksana Pemerintah Daerah

NO.	MISI	PROGRAM PERCEPATAN	SUB PROGRAM PERCEPATAN	KEGIATAN (PROYEK PRIORITAS / KEGIATAN / MENU)	IMPLEMENTASI PELAKSANAAN (SUMBER DANA OTSUS TA.2026)
57	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Penguatan Ketenteraman dan Ketahanan Wilayah serta Harmoni Sosial	Penguatan Ketertiban Umum dan Manajemen Konflik	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga = Rp. 16,8 M
58	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Penguatan Ketenteraman dan Ketahanan Wilayah serta Harmoni Sosial	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
59	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Penguatan Ketenteraman dan Ketahanan Wilayah serta Harmoni Sosial	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	
60	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat serta Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dan Hutan Adat	Inventarisasi dan Identifikasi, Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran Tanah Adat/Ulayat di Provinsi	
61	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat serta Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dan Hutan Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	
62	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat serta Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dan Hutan Adat	Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
63	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat serta Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dan Hutan Adat	Penyelesaian Tanah Adat dalam Kawasan Hutan dan Bekas Tanah Hak Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
64	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat serta Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dan Hutan Adat	Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan	

Sumber:

- Lampiran Inpres 107/2025 pada RAPPP Tahun 2025–2029
- Rencana Anggaran dan Program Otsus TA 2026

MATRIK RAPPP PROVINSI PAPUA TENGAH 2026–2029

Pelaksana Pemerintah Daerah

NO.	MISI	PROGRAM PERCEPATAN	SUB PROGRAM PERCEPATAN	KEGIATAN (PROYEK PRIORITAS / KEGIATAN / MENU)	IMPLEMENTASI PELAKSANAAN (SUMBER DANA OTSUS TA.2026)
65	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
66	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Pelibatan Masyarakat Adat Setempat yang Hidup di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Laut.	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
67	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
68	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Penetapan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
69	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
70	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan dan Tanah serta Sumber Daya Alam yang Terkandung di dalamnya	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
71	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Inventarisasi Tanah Wakaf atau Tempat Peribadatan yang digunakan untuk Pembangunan Sosial, Pendidikan, Kesehatan, dan Keagamaan	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)

Sumber:

- Lampiran Inpres 107/2025 pada RAPPP Tahun 2025–2029
- Rencana Anggaran dan Program Otsus TA 2026

MATRIK RAPPP PROVINSI PAPUA TENGAH 2026–2029

Pelaksana Pemerintah Daerah

NO.	MISI	PROGRAM PERCEPATAN	SUB PROGRAM PERCEPATAN	KEGIATAN (PROYEK PRIORITAS / KEGIATAN / MENU)	IMPLEMENTASI PELAKSANAAN (SUMBER DANA OTSUS TA.2026)
72	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
73	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Adat Lintas Daerah Kabupaten/Kota	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
74	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Penetapan dan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
75	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
76	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
77	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Penguatan Seni dan Budaya Lokal	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)
78	Prasyarat Pembangunan: Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Penguatan Seni dan Budaya Lokal	Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	BELUM TERLAKSANA (KETERBATASAN APBD)

Sumber:

- Lampiran Inpres 107/2025 pada RAPPP Tahun 2025–2029
- Rencana Anggaran dan Program Otsus TA 2026

DIBUTUHKAN DUKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

DALAM PELAKSANAAN INPRES 107/2026 - RAPPP 2026-2029





SARAN DAN MASUKKAN

1



BAPPENAS PERLU MEMPERKUAT KOORDINASI

DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI, PROGRAM, DAN ANGGARAN UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TENGAH SECARA TERINTEGRASI.

2



MEMPERKUAT KOLABORASI LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA,

BUMN, SWASTA, MITRA PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAH DAERAH PADA LEVEL TEKNIS IMPLEMENTASI INPRES 107/2025 DARI HULU HINGGA HILIR.

3



PERLUNYA KOMITMEN KEMENTERIAN/LEMBAGA

DALAM AFIRMASI KEBIJAKAN, PROGRAM/KEGIATAN, DAN ANGGARAN YANG BERSUMBER APBN K/L DALAM Mendukung Pelaksanaan INPRES 107/2025 di Provinsi Papua Tengah, serta terbuka dalam merespons berbagai usulan strategis pemerintah daerah di Provinsi Papua Tengah tahun anggaran 2026-2029.

Terima Kasih

